

---

---

**PATOLOGI EKSEKUSI KURIKULUM NASIONAL:  
TINJAUAN SISTEMATIS KESIAPAN SEKOLAH  
(KTSP - KURIKULUM MERDEKA)**

**Syamsi Jenar Savithra<sup>1</sup>, Verzuwela Blezinsky Manihuruk<sup>2</sup>**

**Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara**

e-mail: <sup>1</sup>syamsijenarsavithra@gmail.com, <sup>2</sup>verzuwelablezinsky@gmail.com

**Abstract:** *Education is a crucial foundation for development, yet system reforms are frequently impeded by the gap between policy theory and practical reality. This study presents a systematic review of national educational curriculum execution pathology, focusing on the transition from the School-Based Curriculum (KTSP) to the Emancipated Curriculum (Kurikulum Merdeka) in Indonesia. The primary issue explored is the structural, regulatory, and cultural gap between central government policy design and grassroots school ecosystem readiness. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) based on PRISMA 2020 guidelines, analysis was conducted on indexed international literature published between 2019 and 2026. Results reveal that curriculum implementation failures are frequently rooted in "policy pathology," where radical pedagogical shifts are not proportionally balanced with capacity building and infrastructure. Findings specifically indicate dual-policy fatigue, pedagogical distortion burdening educators with complex administrative tasks (like designing Teaching Modules and diagnostic assessments), weak instructional leadership, and resource disparities between urban and rural schools. Ultimately, this paper proposes adapting the Integrated Curriculum Implementation Model (IDCI) centered on four main subsystems: long-term regulatory stability, curriculum content alignment, organic peer collaboration, and supportive school ecosystems to bridge the curriculum implementation gap.*

**Keywords:** *Policy Pathology, School Readiness, Emancipated Curriculum, Curriculum Implementation.*

**Abstrak:** Pendidikan merupakan fondasi krusial bagi peradaban, namun reformasi sistemnya sering terhambat oleh kesenjangan antara teori kebijakan dan realitas di lapangan. Penelitian ini menyajikan tinjauan sistematis mengenai patologi eksekusi kebijakan kurikulum pendidikan nasional, berfokus pada transisi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hingga Kurikulum Merdeka di Indonesia. Masalah utamanya adalah kesenjangan struktural, regulasi, dan kultural antara desain kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan ekosistem sekolah di akar rumput. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020, analisis dilakukan terhadap literatur internasional terindeks terbitan 2019-2026. Hasil analisis mengungkap bahwa kegagalan implementasi sering berakar pada "patologi kebijakan", di mana pergeseran paradigma pedagogis radikal tidak diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur secara proporsional. Temuan menunjukkan adanya kelelahan kebijakan ganda (dual-policy fatigue), distorsi pedagogis yang membebani tenaga pendidik dengan administrasi kompleks (seperti penyusunan Modul Ajar dan asesmen diagnostik), kelemahan kepemimpinan instruksional, serta disparitas sumber daya sekolah urban dan rural. Tulisan ini mengusulkan adaptasi Model Implementasi Kurikulum Terintegrasi (IDCI) yang berpusat pada empat pilar: stabilitas regulasi, keselarasan konten kurikulum, kolaborasi sejawat organik, dan ekosistem sekolah suportif untuk menjembatani kesenjangan implementasi kurikulum.

**Kata Kunci:** Patologi Kebijakan, Kesiapan Sekolah, Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum.

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan pilar fundamental dan instrumen paling esensial dalam menentukan lintasan kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi suatu entitas negara di panggung global. Dalam upaya tanpa henti untuk merespons dinamika globalisasi, revolusi industri yang bergerak secara eksponensial, serta pergeseran paradigma kompetensi abad ke-21, pemerintah di berbagai belahan dunia secara terus-menerus dituntut untuk melakukan recalibrasi dan restrukturisasi terhadap cetak biru sistem pendidikan mereka melalui berbagai inisiatif reformasi kurikulum yang masif (Matsumoto, 2019). Namun demikian, dalam banyak kasus historis dan empiris, reformasi kurikulum yang dirancang dengan landasan filosofis yang sangat kuat, argumentasi teoretis yang mutakhir, dan niat politik yang luhur sekalipun sering kali terperosok ke dalam sebuah jurang yang dalam literatur sosiologi kebijakan disebut sebagai kesenjangan implementasi atau implementation gap di tingkat akar rumput (Gouëdard et al., 2020). Kesenjangan implementasi ini pada dasarnya mencerminkan sebuah diskoneksi struktural dan kultural yang sangat fatal antara niat kebijakan yang diformulasikan di tingkat makro oleh elit birokrasi dengan realisasi operasional kurikulum di tingkat mikro oleh para praktisi pendidikan di ruang-ruang kelas.

Di dalam lanskap pendidikan Indonesia, diskursus dan perdebatan akademik mengenai patologi implementasi kurikulum menjadi sangat relevan, mendesak, dan krusial ketika para pengamat mengamati secara saksama rekam jejak historis pergantian kurikulum nasional yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Lintasan historis transisi pendidikan di Indonesia, mulai dari implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang kemudian disempurnakan secara desentralistik menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, lalu

direvisi secara komprehensif menjadi Kurikulum 2013 (K13) dengan pendekatan tematik-integratifnya, dan yang terkini bertransformasi menjadi Kurikulum Merdeka (KM), memperlihatkan sebuah pola turbulensi kebijakan yang sangat konsisten namun sering kali mengabaikan daya serap institusi di level bawah (Sari et al., 2023). Kurikulum Merdeka, yang secara resmi diperkenalkan oleh kementerian terkait sebagai sebuah strategi adaptasi dan pemulihan krisis pasca-pandemi COVID-19, pada mulanya dikonseptualisasikan untuk memberikan ruang otonomi pedagogis yang jauh lebih besar kepada ekosistem sekolah dan guru, dengan tujuan mendorong praktik diferensiasi pembelajaran yang manusiawi serta menanamkan nilai-nilai karakter fundamental bangsa melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Angga et al., 2022). Meskipun kerangka konseptual baru ini secara epistemologis dinilai sangat progresif dan sejalan dengan tren pendidikan global, berbagai studi dan laporan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa implementasinya sering kali mengabaikan kompleksitas ekosistem sekolah, kesenjangan infrastruktur, dan realitas kesiapan mental maupun teknis guru di lapangan (Fullan, 2020).

Reformasi struktural yang dipaksakan dan didorong dari struktur hierarki paling atas (top-down) tanpa mempertimbangkan secara matang kapasitas adaptif, kondisi sosiokultural, dan kesiapan emosional para agen perubahan di tingkat paling bawah cenderung berujung pada kegagalan operasional yang berulang secara siklikal. Tantangan terbesar dan paling persisten yang teridentifikasi dalam fase inisiasi dan implementasi awal Kurikulum Merdeka adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif, filosofis, dan teknis mengenai struktur ontologis dari kurikulum itu sendiri di kalangan praktisi pendidikan. Kurikulum Merdeka secara fundamental menuntut terjadinya sebuah pergeseran paradigma mental yang sangat

drastis, dari sebuah sistem pendidikan yang selama puluhan tahun sangat kaku, tersentralisasi, dan terstandarisasi (seperti pada era KTSP dan K13), menuju sebuah sistem yang sangat cair dan fleksibel di mana setiap guru diwajibkan untuk mendesain perangkat ajar mereka sendiri, menyusun Modul Ajar dari nol tanpa format yang seragam, serta harus memiliki kemampuan hermeneutik untuk menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP) nasional menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) secara mandiri di tingkat kelas (Fauzan et al., 2023). Beban ekspektasi kognitif dan administratif yang luar biasa besar ini tidak pelak menimbulkan disorientasi dan guncangan profesional bagi jutaan tenaga pendidik yang selama karir mereka terbiasa menjadi sekadar eksekutor pasif dari berbagai buku teks dan instruksi silabus yang diturunkan oleh pemerintah pusat.

Dengan memetakan secara presisi elemen-elemen patologi implementasi ini, diharapkan para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan di berbagai tingkatan dapat mengkalibrasi ulang strategi intervensi mereka menuju sebuah pendekatan yang jauh lebih partisipatif, realistis, dan benar-benar berpusat pada kesiapan instrumen manusia dalam keseluruhan ekosistem pendidikan..

## METODE

Penelitian tinjauan sistematis ini menggunakan rancangan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dikonseptualisasikan dan dilaksanakan secara sangat ketat berdasarkan protokol dan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) versi pembaruan tahun 2020. Pemilihan pedoman metodologis PRISMA 2020 ini didasarkan pada keunggulannya yang telah diakui secara global dalam menjamin tingkat transparansi tertinggi, kelengkapan narasi, dan akurasi pelaporan

metodologis, yang kesemuanya merupakan aspek krusial dalam upaya untuk menyintesis beragam bukti empiris yang tersebar terkait dengan efektivitas intervensi dan kebijakan pendidikan (Page et al., 2021).

Pada fase perencanaan awal, perumusan pertanyaan penelitian disusun dengan menggunakan kerangka kerja epistemologis PICO(S) (*Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Study design*) untuk mengakomodasi inklusi studi-studi kuantitatif, serta mengaplikasikan perluasan kerangka SPIDER/SPICE untuk memastikan bahwa studi-studi kualitatif yang mendalami aspek fenomenologis dari transisi kurikulum secara multidimensional dapat terangkum dengan baik.

Berdasarkan protokol metodologis tersebut, strategi pencarian yang komprehensif dan multidisipliner dikembangkan. Pencarian literatur dilakukan melalui pangkalan data akademik utama tingkat dunia, yaitu EBSCOhost (yang secara spesifik mencakup koleksi *Academic Search Complete*, *Education Source*, dan *ERIC*), serta basis data Scopus, dengan membatasi pencarian pada jurnal-jurnal internasional spesifik yang diterbitkan secara eksklusif dalam rentang waktu maksimal tujuh tahun ke belakang, yakni antara tahun 2019 hingga tahun 2026. Kombinasi kata kunci pencarian tingkat lanjut (menggunakan operator Boolean) yang dikerahkan mencakup frasa-frasa seperti "policy pathology", "school readiness", "curriculum implementation gap", "Kurikulum Merdeka", dan "educational change management".

Populasi sasaran yang menjadi unit analisis dalam tinjauan literatur ini adalah entitas sekolah, guru, dan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas yang secara langsung mengalami turbulensi akibat transisi atau reformasi kurikulum nasional. Seleksi artikel dilakukan melalui serangkaian tahapan eliminasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan secara tanpa kompromi.

Kriteria inklusi secara spesifik mensyaratkan bahwa setiap artikel yang masuk ke dalam fase analisis akhir harus diterbitkan dalam jurnal internasional yang menerapkan sistem tinjauan sejawat (*peer-reviewed*) dengan reputasi yang terverifikasi pada periode 2019-2026. Artikel tersebut juga harus berfokus secara tematik pada evaluasi implementasi, analisis kesiapan agen perubahan di garis depan, atau diskursus teoretis mengenai patologi kebijakan kurikulum.

**Tabel 1 Ringkasan Kriteria Inklusi dan Eksklusi Parameter Sistematis**

Dimensi Parameter	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi yang Dieliminasi
Rentang Publikasi	Tahun terbit antara 2019 – 2026	Publikasi yang diterbitkan sebelum tahun 2019
Tipologi Dokumen	Artikel jurnal tinjauan sejawat ( <i>peer-reviewed</i> ), hasil studi empiris	Editorial, bab buku, makalah konferensi non-jurnal, laporan teknis non-akademik
Kedalaman Topik	Analisis patologi implementasi, kesiapan institusional sekolah/guru, dan dinamika transisi kurikulum	Evaluasi murni terkait hasil belajar kuantitatif siswa tanpa adanya analisis mengenai implementasi sistem
Kontekstualisasi Wilayah	Perspektif global yang memiliki relevansi komparatif terhadap negara berkembang	Konteks wilayah eksklusif pada jenjang pendidikan tinggi yang sama sekali tidak terkait

dan dengan Indonesia pendidikan K-12

Penilaian kualitas studi dan identifikasi potensi risiko bias (*risk of bias*) di dalam masing-masing literatur dilakukan melalui metode triangulasi dan kodifikasi independen antar-peneliti untuk menjamin tingkat reliabilitas interkoder yang solid. Seluruh data kualitatif dan kuantitatif yang berhasil diekstraksi dari korpus literatur tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan sintesis tematik heuristik guna mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi, kontradiksi-kontradiksi teoretis, dan jaring hubungan sebab-akibat yang secara fundamental mendasari kegagalan tragis maupun keberhasilan sporadis dari proses eksekusi kurikulum baru di tingkat institusi pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis sistematis dan sintesis mendalam terhadap seluruh korpus literatur yang telah berhasil diekstraksi, pembahasan komprehensif mengenai patologi eksekusi kurikulum dan tingkat kesiapan sekolah ini secara arsitektural diorganisasikan ke dalam empat sub-tema utama yang saling beririsan. Sub-tema ini mengurai dinamika yang sangat kompleks dari pergeseran arah kebijakan tingkat makro, respons adaptif maupun resistensi para aktor pendidikan di lapangan, serta berbagai implikasi sistemik yang timbul sebagai konsekuensi langsung dari ketidaksiapan struktural maupun hambatan psikologis individual. Patologi Kebijakan dan Evolusi Kelelahan Birokrasi dalam Transisi Kurikulum Dinamika dan turbulensi implementasi kurikulum yang berulang kali terjadi di Indonesia merupakan representasi nyata dan presisi dari apa yang dalam wacana literatur kebijakan publik internasional secara tegas diklasifikasikan sebagai patologi

kebijakan pendidikan.

Tinjauan mendalam terhadap rekam jejak historis kebijakan nasional menunjukkan adanya siklus perubahan yang sangat cepat dan terkadang impulsif, mulai dari paradigma KTSP yang sangat sarat dengan beban konten kompetensi per mata pelajaran, bergeser menuju Kurikulum 2013 yang berupaya keras mengintegrasikan pendekatan tematik-integratif namun sering kali dinilai terlalu rumit secara administratif, hingga lahirnya Kurikulum Merdeka yang secara filosofis menekankan pada otonomi sekolah, diferensiasi gaya belajar, dan internalisasi esensi profil karakter. Namun, akselerasi perubahan dokumen legal-formal di tingkat makro pemerintahan ini sering kali terjebak dalam sebuah disonansi kognitif yang akut ketika harus berhadapan secara langsung dengan realitas habitus, infrastruktur, dan tradisi para aktor di tingkat mikro sekolah.

Praktik pemaksaan regulasi yang bersifat struktural namun tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia secara organik dan empati ini pada akhirnya mengikis secara perlahan namun pasti otoritas moral para manajer kebijakan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara drastis terhadap objektivitas dari reformasi pendidikan tersebut. Lebih jauh lagi, literatur empiris secara tegas mengidentifikasi bahwa salah satu akar penyebab utama kegagalan reformasi kurikuler yang persisten di negara berkembang adalah pandangan skeptis para eksekutor di garis depan yang menganggap adopsi kurikulum baru semata-mata sebagai sebuah instrumen "kepatuhan" (compliance) administratif belaka, dan sama sekali bukan dipandang sebagai sebuah bentuk kemitraan strategis (partnership) untuk memajukan pendidikan. Ketika sebuah perubahan kurikulum hanya dilihat sebagai intervensi paksaan yang diturunkan dari pusat kekuasaan, maka implementasi yang terjadi di sekolah hanyalah sebatas adaptasi mekanis yang penuh dengan

kepura-puraan.

Fenomena ini tercermin jelas ketika guru-guru di lapangan merespons tuntutan Kurikulum Merdeka dengan cara memanipulasi perangkat ajar lama yang mereka miliki, sekadar menempelkan label terminologi baru pada dokumen yang sama, sementara metodologi pengajaran aktual yang terjadi di balik pintu kelas yang tertutup tetap menggunakan paradigma instruksional tradisional yang berpusat pada dominasi ceramah guru, orientasi pada ujian, dan akurasi konten, bukan memprioritaskan pada pengembangan pemikiran kritis atau kompetensi komunikatif yang notabene menjadi tujuan awal dari penciptaan kurikulum tersebut (Adriansen et al., 2023). Konflik internal yang berkelanjutan antara aspirasi kebijakan di atas kertas dan realitas praktik konservatif ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa sebaik apa pun desain sebuah kurikulum yang ideal, dokumen tersebut sama sekali tidak memiliki daya ungkit transformatif jika tidak terkalibrasi secara presisi dengan ekologi kultural, mentalitas, dan kapasitas aktual dari sekolah itu sendiri. Dinamika Kesiapan Organisasi, Disparitas Struktural, dan Defisit Kepemimpinan Instruksional Kesiapan organisasi secara aksiomatik merupakan prekursor yang mutlak diperlukan bagi terwujudnya keberhasilan setiap inisiatif perubahan kurikulum yang berskala nasional.

Merujuk secara khusus pada kerangka teoretis mengenai organizational readiness for change (kesiapan organisasi untuk berubah), konsep kesiapan tidak boleh hanya direduksi menjadi sekadar kelengkapan infrastruktur fisik, ketersediaan anggaran, atau kelengkapan fasilitas teknologi semata. Kesiapan pada hakikatnya merupakan akumulasi dari keyakinan komunal seluruh anggota organisasi dalam konteks ini adalah para guru, staf pendidikan, dan manajemen sekolah bahwa perubahan yang diusulkan tersebut adalah sesuatu yang penting, akan membawa manfaat yang nyata, dan secara kolektif mereka memiliki

kapasitas, sumber daya, serta kompetensi teknis untuk melaksanakannya secara efektif (Changqing & Ghazali, 2021). Namun demikian, temuan konsisten yang diperoleh dari berbagai sintesis studi empiris berskala internasional yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2026 secara meyakinkan mengonfirmasi bahwa mayoritas institusi sekolah masih berada pada tingkat kesiapan yang sangat rendah hingga marjinal dalam upaya mereka merespons ekspektasi dan beban kognitif dari Kurikulum Merdeka.

Ketidaksiapan yang meluas ini termanifestasi secara nyata di dalam berbagai dimensi organisasional yang saling berkaitan erat. Salah satu variabel paling kritis dan krusial yang diidentifikasi secara berulang kali sebagai faktor penghambat kesiapan institusi sekolah adalah absennya kapabilitas kepemimpinan instruksional yang adaptif dari figur kepala sekolah. Literatur pedagogis kontemporer secara tegas mengonseptualisasikan sosok kepala sekolah bukan lagi sekadar administrator rutin, melainkan sebagai pemimpin multidimensional visioner yang dituntut harus mampu mengintegrasikan secara harmonis peran instruksional, manajerial, dan sosial emosional secara simultan di tengah krisis. Berbagai kajian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional secara empiris terbukti mampu meningkatkan tingkat motivasi guru, membangun resiliensi mental, dan memupuk suburnya budaya inovasi yang otentik di lingkungan sekolah. Sayangnya, membedah realitas pahit di lapangan menunjukkan fakta bahwa tidak sedikit institusi pendidikan yang hingga saat ini masih terbelenggu kuat oleh budaya organisasi warisan hierarkis yang sangat birokratis dan tidak sepenuhnya mendukung lahirnya inisiatif kolaborasi inklusif antarguru di ruang guru (Stone-Johnson & Weiner, 2020). Kurangnya program pelatihan kepemimpinan berbasis kompetensi di tingkat manajerial membuat banyak kepala sekolah merasa kebingungan dan kesulitan dalam upayanya merumuskan visi bersama

(shared vision) yang koheren untuk menavigasi masa transisi kurikulum yang penuh dengan ketidakpastian ini.

Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa masih teramat banyak institusi pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di penjuru negeri yang bahkan belum memiliki akses dasar terhadap materi instruksional cetak yang memadai, jaringan infrastruktur internet yang stabil untuk mengakses platform pemerintah, maupun ketersediaan pakar kurikulum lokal yang dapat dijadikan rujukan konsultasi (Nuryana et al., 2023). Disparitas struktural ini pada gilirannya menciptakan sebuah spektrum eksekusi kebijakan yang sangat bias dan elitis; di mana hanya sekolah-sekolah unggulan yang telah ditopang oleh modalitas sumber daya mapan yang mampu mengeksplorasi potensi dan memanen manfaat Kurikulum Merdeka secara maksimal, sementara ribuan sekolah di daerah marginal akan terus bergulat tanpa henti pada tahap inisiasi pencarian makna tanpa pernah satu kali pun mencapai tahap pelembagaan kebijakan atau transformasi pendidikan yang sungguh-sungguh bermakna bagi siswanya. Distorsi Pedagogis dan Krisis Beban Administratif Pemicu Burnout GuruGuru selalu diklaim sebagai ujung tombak dan agen perubahan yang paling sentral dalam mekanika roda reformasi pendidikan apa pun di dunia ini, namun di saat yang bersamaan, sejarah membuktikan bahwa mereka juga merupakan entitas hierarki yang paling rentan terhadap guncangan kebijakan yang impulsif.

Paradigma sentral dari Kurikulum Merdeka secara agresif memperkenalkan konsep instruksi berdiferensiasi (differentiated instruction) yang mewajibkan setiap guru untuk melakukan asesmen diagnostik dan pemetaan komprehensif terhadap berbagai dimensi siswa yang mencakup tingkat kesiapan belajar kognitif, profil gaya belajar individual, serta peta minat dan bakat masing-masing individu secara presisi. Berdasarkan segunung data diagnostik ini, guru kemudian dihadapkan pada

ekspektasi yang luar biasa tinggi untuk mampu memodifikasi dan mengorkestrasi tiga elemen pedagogis utama secara bersamaan di dalam satu sesi pembelajaran, yaitu: diferensiasi konten (materi spesifik apa yang dipelajari siswa sesuai levelnya), diferensiasi proses (bagaimana mekanisme penyerapan materi tersebut berlangsung sesuai gaya belajarnya), dan diferensiasi produk (bagaimana wujud output evaluasi pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa) (Samuel Ben Gurion, 2024). Secara filosofis dan landasan teoretis murni, pendekatan yang sangat humanis ini merupakan antitesis langsung dari model pendidikan era KTSP atau metodologi one-size-fits-all yang cenderung bersifat reduksionis dan menyamaratakan kemampuan anak. Namun, dalam aplikasi praktisnya yang brutal di lapangan, tuntutan akademis ini menimbulkan sebuah kompleksitas manajemen kelas yang berlipat ganda secara eksponensial bagi seorang guru tunggal yang setiap harinya harus berhadapan dan mengendalikan puluhan siswa dalam satu ruang kelas dengan spektrum latar belakang kognitif dan sosial yang sangat heterogen (Nadrah, 2022).

Kompleksitas instruksional harian ini menjadi semakin diperparah hingga mencapai titik didih oleh hadirnya rintangan yang bersumber dari sistem evaluasi dan parameter asesmen yang sama sekali baru. Berbeda jauh dengan instrumen pada era KTSP maupun K13 yang telah dengan matang menyediakan perangkat rubrik penilaian terstandarisasi berskala nasional yang mudah diaplikasikan, Kurikulum Merdeka memaksa dan mewajibkan guru untuk memutar otak merancang matriks asesmen yang berbeda-beda secara mandiri demi mengakomodasi target-target pembelajaran yang sangat spesifik, namun dengan mengakui adanya jalur-jalur pencapaian yang bervariasi secara ekstrem bagi setiap siswa. Ketidakmampuan metodologis guru dalam merumuskan rubrik yang benar-benar memenuhi prinsip validitas dan

reliabilitas ilmiah ini secara instan menimbulkan gelombang kebingungan massal di kalangan pendidik di seluruh penjuru negeri (Samuel Ben Gurion, 2024). Sebagai konsekuensi logisnya, muncul sebuah paradoks implementasi yang tragis; niat mulia kebijakan untuk secara radikal mengurangi kungkungan standarisasi demi membebaskan potensi kreatif siswa justru pada praktiknya berubah wujud menjadi sebuah kerangkeng penjara birokrasi dan administrasi bentuk baru yang mengikat leher para guru. Banyak serikat dan forum guru secara anonim melaporkan terjadinya tingkat kelelahan ekstrem secara fisik dan mental (burnout) serta hilangnya identitas mereka sebagai seorang pendidik profesional, semata-mata karena proporsi waktu kerja mereka lebih banyak habis tersita untuk meramu dokumen Modul Ajar, menyusun Alur Tujuan Pembelajaran, dan tenggelam dalam lautan administrasi perencanaan di depan komputer, daripada berinteraksi secara substansial, emosional, dan mendidik dengan peserta didik di dalam kelas.

Kondisi psikologis yang tertekan dan himpitan tuntutan administratif ini pada akhirnya memicu sebuah fenomena krusial yang dalam literatur pendidikan diistilahkan sebagai distorsi pedagogis. Ketika tenaga pendidik setiap harinya terus-menerus dihadapkan pada ancaman tenggat waktu administratif yang sangat ketat dari pengawas sekolah namun menerima porsi pendampingan teknis yang sangat minim, respons alamiah mereka adalah mengambil berbagai jalan pintas prosedural dengan terpaksa mengabaikan substansi metodologis dari kurikulum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan secara empiris pada kelemahan struktural kurikulum yang diimplementasikan secara aktual di mana masih terdapat penekanan yang sangat berlebihan pada metode transmisi informasi yang bersifat teoretis dan pengabaian yang disengaja terhadap praktik-praktik pemecahan masalah analitis yang bermakna bagi nalar siswa

(Salehi et al., 2025). Alih-alih bertransformasi dengan mulus menjadi fasilitator andal yang mampu merangsang daya nalar dan kreativitas sebagaimana yang diamanatkan secara romantis oleh buku pedoman Kurikulum Merdeka, jutaan guru terpaksa melarikan diri kembali ke zona nyaman mereka dari masa lalu yaitu penerapan metode ceramah satu arah, penekanan pada hafalan mati (grammar-translation), dan pendekatan kaku yang sepenuhnya berpusat pada perolehan nilai ujian.

Oleh karena itu, penerapan pendekatan sistem utuh atau system-ness yang memandang pendidikan sebagai sebuah ekologi yang bagian-bagiannya saling bernapas dan memengaruhi menjadi prasyarat yang krusial dalam mengelola dan menjinakkan dinamika perubahan besar ini.

**Tabel 2 penerapan pendekatan sistem utuh atau system-ness**

Domain Patologi Struktural	Indikasi Klinis Kegagalan (Implementat ion Gap)	Konstruksi Strategi Penyelarasan (Alignment Strategy)
<b>Kapasitas Regulasi Organisasi</b>	Sindrom <i>dual-policy fatigue</i> ; kebingungan akut akibat tumpang tindih regulasi	Stabilitas Kebijakan ( <i>Policy Stability</i> ): Sinkronisasi kerangka regulasi jangka panjang dan penyederhanaan standar pelaporan administratif yang drastis.
	warisan lama dan kerangka kurikulum yang baru.	Keselarasan Konten ( <i>Content Alignment</i> ): Penyediaan bank modul ajar kolaboratif terpusat dan
<b>Kapasitas Pedagogis Individu</b>	Terjadinya distorsi instruksional; fenomena <i>burnout</i> saat guru berjuang memahami mekanisme rumit translasi	

CP/TP/ATP dan diferensiasi kelas. penahapan transisi ekspektasi pedagogis yang direkognisi.

Tumbuhnya sikap *mechanical compliance*; resistensi kognitif untuk meninggalkan metode lama; manifestasi defisit kepemimpinan instruksional. Pengembangan Subsystem Manusia: Implementasi praktik *co-teaching* dan pembentukan komunitas belajar berbasis sekolah (*peer collaboration*).

Ekosistem Supportif (*Supportive Ecosystem*):

Kesenjangan sumber daya sekolah antara urban-rural; kelangkaan fasilitas untuk mewujudkan *project-based learning* yang substantif. Skema distribusi sumber daya yang bersifat asimetris dengan memprioritaskan penyuntikan dana ke kawasan marginal.

**Kapasitas Kultural Ekosistem**

**Kapasitas Infrastruktur Fisik**

Berfungsinya subsistem fondasi ini mengharuskan para teknokrat dan pembuat kebijakan di tingkat dinas pendidikan lokal provinsi maupun kabupaten untuk turun tangan melakukan proses kurasi dan kontekstualisasi terhadap modul-modul panduan nasional agar menjadi jauh lebih relevan, membumi, dan aplikatif bila dihadapkan dengan realitas kondisi geografis serta nuansa sosiokultural daerah masing-masing yang unik.

Pilar subsistem yang kedua dan tidak kalah vitalnya berfokus penuh pada Pengembangan Profesional Guru (*Human Subsystem*). Menilik realitas yang ada,

upaya mengatasi kesenjangan kompetensi yang menganga lebar tidak dapat lagi dan tidak boleh lagi direduksi kebermaknaannya menjadi sekadar penyelenggaraan lokakarya seremonial atau seminar orientasi kurikulum massal yang bersifat monolog. Paradigma pengembangan kapasitas kompetensi guru harus secara paksa digeser ke arah penerapan metode *co-teaching* (mengajar kolaboratif), implementasi supervisi klinis yang bersifat reflektif dan bukan menghakimi, serta pembudayaan kolaborasi sejawat di dalam lingkup forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang pertemuannya benar-benar secara eksklusif berorientasi pada pemecahan studi kasus masalah empiris yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan analisis sosiologis, ketika seorang instruktur atau figur guru senior mampu meruntuhkan ego dan menjalin kemitraan yang sejajar dengan rekan sejawatnya, mereka secara empiris terbukti memiliki kapasitas untuk mendekonstruksi kecemasan bersama, saling melengkapi kekurangan, dan mengurai benang kusut kompleksitas tuntutan administratif diferensiasi pengajaran secara jauh lebih organik.

Pilar subsistem ketiga yang mutlak dihadirkan adalah penciptaan Ekosistem Sekolah yang Supportif (*Supportive Subsystem*). Pada titik persimpangan inilah kualitas kepemimpinan seorang kepala sekolah memegang peranan yang sangat menentukan dan esensial untuk secara aktif membangun kembali kepercayaan institusional yang terkikis dan memiliki keberanian moral untuk mengalokasikan beban kerja birokrasi secara adil di antara stafnya, sehingga percikan inisiatif kreatif dari guru untuk berinovasi di kelas tidak keburu layu dan mati muda akibat minimnya dukungan sokongan logistik fasilitas maupun suntikan moril dari pihak manajemen. Pilar subsistem keempat, yang bertindak layaknya sebuah jangkar penstabil bagi keseluruhan struktur model ini, adalah Stabilitas Regulasi (*Regulatory Control Mechanism*).

## SIMPULAN

Tinjauan sistematis yang telah dibedah secara komprehensif ini pada akhirnya menyingkap sebuah realitas bahwa keseluruhan proses transisi kurikulum pendidikan nasional—mulai dari peninggalan era Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hingga mencapai eksperimentasi Kurikulum Merdeka yang tengah berlangsung saat ini—sarat dengan berbagai tantangan multidimensional yang secara terang-terangan mengindikasikan kuatnya cengkeraman patologi kebijakan pendidikan di negara ini. Berdasarkan sintesis teoretis, akar persoalan dari kegagalan implementasi ini sejatinya sama sekali tidak terletak pada kelemahan intrinsik atau kecacatan desain konseptual dari dokumen Kurikulum Merdeka itu sendiri yang secara filosofis dan pedagogis diakui sangat relevan, progresif, dan esensial untuk merespons dinamika kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang serba tidak pasti melainkan bersumber dari dalamnya jurang kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang menganga di tingkat ekosistem sekolah sebagai unit pelaksana terkecil. Serangkaian regulasi yang didorong secara paksa dari struktur birokrasi atas (*top-down*) sering kali gagal beresonansi secara harmonis dengan kapasitas intelektual dan tingkat kesiapan kultural agen perubahan (guru dan kepala sekolah) di garis pertahanan depan. Sindrom kelelahan kebijakan ganda yang menjangkiti institusi, himpitan beban administratif yang menindas dan memicu suburnya fenomena distorsi pedagogis, serta kerumitan yang ditimbulkan oleh tuntutan penerapan instruksi berdiferensiasi dan matriks penilaian yang kompleks secara kumulatif telah mengakibatkan jutaan guru mengalami disorientasi peran profesi dan kelelahan mental yang akut. Rantai fenomena patologis ini semakin diperparah hingga mencapai kondisi kritis oleh adanya realitas disparitas sumber daya institusional yang tajam antara wilayah

urban dan rural, serta meluasnya defisit kapasitas kepemimpinan instruksional dari jabatan kepala sekolah, yang pada titik akhirnya secara tragis mereduksi nilai-nilai agung dari visi emansipatoris Kurikulum Merdeka menjadi tidak lebih dari sekadar pemenuhan ritual kepatuhan mekanis terhadap berbagai format administratif baru yang tak berkesudahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriansen, H. K., Juul-Wiese, T., Madsen, L. M., et al. (2023). Emplacing English as lingua franca in international higher education: A spatial perspective on linguistic diversity. *Population, Space and Place*, 29(2), e2619.
- Angga, et al. (2022). Project-based learning and students' motivation in learning within the Kurikulum Merdeka framework.
- Beauchamp, G., Hulme, M., Clarke, L., Hamilton, L., & Harvey, J. A. (2021). 'People miss people': A study of school leadership and management.
- Changqing, & Ghazali. (2021). Analysis of readiness for change and digital audit implementation.
- Demboh, P., & Susanti, D. (2021). Educational policy implementation, Education reform, Quality attainment, Quality knowledge. *INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal*.
- Fauzan, F., Ansori, R. A. M., Dannur, M., Pratama, A., & Hairit, A. (2023). The implementation of the merdeka curriculum (independent curriculum) in strengthening students' character in Indonesia. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1), 136-155.
- Fullan, M. (2020). System change in education. *American Journal of Education*, 126(4), 653-663.
- Gouëdard, P., Pont, B., Hyttinen, S., & Huang, P. (2020). Curriculum reform: A literature review to support effective implementation. *OECD Education Working Papers*, 239.
- Gurion, S. B. (2024). Teacher readiness and implementation challenges of Kurikulum Merdeka in Indonesian schools. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 5(1), 115-116.
- Matsumoto. (2019). Reform efforts driven by human capital to advance international competitiveness.
- Nadrah, N. (2022). Implementation Of The Kurikulum Merdeka At The Senior High School. *International Journal of Health, Education and Social (IJHESS)*, 3(3).
- Nuryana, Z., Xu, W., Kurniawan, L., Sutanti, N., Makruf, S. A., & Nurcahyati, I. (2023). Student stress and mental health. *Academy of Education Journal*.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Peters, B. G., & Nagel, M. (2022). Zombie policies that lose resonance and relevance over time. *Policy and Society*.
- Salehi, et al. (2025). Pathology of the Implemented Curriculum of Islamic Education Courses in the elementary education program of teacher training in Iran.
- Sanusi, et al. (2023). Methodology for Systematic Reviews in Education.
- Sari, F. F. K., Sukarno, S., & Murwaningsih, T. (2023). The New Paradigm of Merdeka Curriculum: Implementation of Pancasila Education Subject in Elementary School.
- Siddaway, A. P., et al. (2019). Systematic review methodology in education research.
- Stone-Johnson, C., & Weiner, J. M. (2020). School Principal Leadership in Contemporary Education.